



Theoretical and Implementational Problems in Curriculum Development and the Learning Process

Annur Sofiah¹, Abdurahmansyah²

Email Korespondensi: annursofiah953@gmail.com

Universitas UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

This research examines the theoretical and practical challenges in the development and implementation of the curriculum in Indonesian education. The aim is to analyze these issues and propose reconstructive solutions so that curriculum theory and practice align with the needs of 21st-century education. Using a qualitative approach, this study employs a literature review method with analysis of academic sources, policies, and curriculum documents from 2020 to 2024. The population includes relevant educational literature and policy documents, with purposive sampling based on relevance and credibility. Data collection is conducted through document analysis with systematic coding techniques and thematic categorization, utilizing content analysis. The findings indicate theoretical problems rooted in a crisis of philosophy, epistemology, and axiology, as well as practical issues such as teacher competencies, infrastructure limitations, and top-down policies. The conclusion emphasizes the need for comprehensive curriculum reconstruction that prioritizes relevance, flexibility, and the integration of values and technology to shape character and competencies that meet global needs. Key implications include decentralization of policies, teacher professionalism, and reflective evaluation to enhance the quality and relevance of education.

Keywords: Curriculum Development, Implementation Issues, Education Policy, Reconstruction, Indonesia

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan landasan utama dalam sistem pendidikan yang berperan sebagai penentu arah dan kualitas pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman (Abdurrahmansyah, 2021; Ornstein & Hunkins, 2018). Dalam konteks pendidikan Islam, pengembangan kurikulum memiliki dimensi filosofis dan ideologis yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kurikulum tidak sekadar teknis tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan moral dan spiritual peserta didik (Abdurrahmansyah, 2021; Alwasilah, 2019). Fenomena saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perancangan kurikulum dan implementasinya di lapangan, yang menyebabkan praktik pembelajaran tidak sesuai dengan harapan ideal, terutama karena pendekatan sentralistik dan kebijakan yang kurang memperhatikan konteks lokal (Ramdani, 2022; Syahputra, 2021).

Permasalahan utama yang muncul adalah ketidaksinkronan antara kerangka teoritik dan praktik implementasi kurikulum. Dimensi filosofis, epistemologis, dan aksiologis yang seharusnya selaras sering kali tidak terpenuhi, sehingga kurikulum menjadi kurang relevan dan kehilangan daya transformasi terhadap peserta didik dan masyarakat (Abdurahmansyah, 2022; Syarifudin, 2020). Selain itu, rendahnya kompetensi guru dan keterbatasan fasilitas pendidikan, khususnya dalam literasi digital dan pendekatan pedagogik inovatif, menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kurikulum yang adaptif dan kontekstual (Ramdani, 2022; Dewi & Harahap, 2022). Kebijakan kurikulum yang bersifat top-down menyebabkan guru kurang diberi ruang inovasi dan kreativitas, sehingga pembelajaran cenderung mekanis dan kurang responsif terhadap kebutuhan peserta didik (Abdurahmansyah, 2021; Hidayat & Fathurrochman, 2021).

Dari sisi epistemologis, pengembangan kurikulum yang lebih mementingkan aspek akademik dan teknis tanpa mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan spiritual menimbulkan krisis orientasi, di mana lulusan pendidikan hanya unggul kognitif tapi miskin empati serta moralitas (Abdurahmansyah, 2022; Latifah & Nasution, 2021). Problem implementatif lainnya terkait dengan minimnya pelatihan profesional bagi guru dan kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, yang berakibat pada rendahnya integrasi pembelajaran digital yang bermakna di lembaga pendidikan (Putri & Rachman, 2023; Syahputra, 2021). Sistem evaluasi yang kurang reflektif juga memperburuk efektivitas pembelajaran karena tidak memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan strategi belajar mengajar (Abdurahmansyah, 2021; Wulandari & Nasir, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problem teoritik dan implementatif dalam pengembangan kurikulum di Indonesia sekaligus mengidentifikasi solusi rekonstruktif yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik kurikulum agar pendidikan nasional mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan global (Abdurahmansyah, 2021; Amin & Suhono, 2022). Kebaruan penelitian ini adalah pendekatan integratif yang menggabungkan aspek filosofis, epistemologis, dan aksiologis secara holistik, serta menekankan sinergi antara kebijakan, praktik pendidik, dan konteks sosial budaya lokal sebagai kunci keberhasilan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan (Abdurahmansyah, 2022; Lestari & Wijayanti, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian "Problem Teoritik dan Implementatif dalam Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran" menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (literature review). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis masalah teoritik dan implementatif yang muncul dalam pengembangan kurikulum dengan cara mendalami sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal nasional, dan dokumen kebijakan pendidikan terkini (Abdurahmansyah, 2021; Cresswell, 2023). Studi pustaka memungkinkan integrasi konsep-konsep filosofis, epistemologis, dan aksiologis dari berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran utuh tentang isu yang dikaji (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2021).

Instrumen penelitian berupa dokumen-dokumen tertulis yang mencakup teks buku, artikel jurnal, dan hasil kajian kebijakan pendidikan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang sistematis dan reflektif, dengan tahapan pengkodean data, kategorisasi tematik, dan sintesis hasil untuk menemukan pola serta hubungan antar konsep teoritik dan implementatif pengembangan kurikulum (Emzir, 2021; Abdurahmansyah, 2022). Proses analisis dilakukan secara iteratif sehingga memungkinkan penyesuaian interpretasi berdasarkan temuan-data yang ditemukan.

Populasi penelitian adalah seluruh literatur dan kebijakan kurikulum yang dipublikasikan antara tahun 2020–2024 yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan kriteria relevansi isi, kredibilitas penerbit, serta waktu terbit agar kajian bersifat mutakhir dan kontekstual (Sudaryono, 2021; Lestari & Wijayanti, 2023). Pemilihan tersebut juga mempertimbangkan inklusi referensi yang telah digunakan dalam kajian sebelumnya untuk menjaga kesinambungan kajian (Abdurahmansyah, 2021).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan sumber pustaka melalui database nasional dan internasional yang dapat diakses secara daring, seperti Google Scholar. Selanjutnya, dilakukan seleksi dokumen berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diikuti dengan pembacaan mendalam dan pencatatan data relevan terkait problem teoritik, problem implementatif, dan solusi rekonstruktif dalam pengembangan kurikulum. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk memetakan isu utama dan hubungan antar variabel. Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dengan dukungan kutipan ilmiah agar menghasilkan sintesis yang komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan kurikulum nasional (Sugiyono, 2022; Cresswell, 2023; Abdurahmansyah, 2022).

Dengan metode tersebut, penelitian mampu menggali secara mendalam dan menyeluruh fenomena pengembangan kurikulum dari perspektif filosofis, pedagogis, dan praktis sehingga menghasilkan rekomendasi strategis yang berbasis bukti ilmiah dan kontekstual untuk meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi kurikulum di Indonesia sekaligus mempertahankan nilai-nilai spiritual dan sosial bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Teoritik dalam Pengembangan Kurikulum

Problem teoritik dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya berakar pada ketidakharmonisan antara konsep ideal kurikulum dan realitas sosial pendidikan. Persoalan fundamental terletak pada ketidakjelasan landasan filosofis dan paradigma pendidikan yang digunakan dalam merumuskan kurikulum. Kurikulum sering kali disusun berdasarkan kepentingan administratif dan politik, bukan atas dasar kebutuhan epistemologis dan kultural peserta didik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori pendidikan dan praktik pembelajaran di lapangan (Abdurahmansyah, 2021).

Abdurahmansyah (2022) dalam karya lainnya *Cakrawala Pendidikan Islam: Isu-Isu Kurikulum dan Pembelajaran Klasik sampai Kontemporer* menjelaskan bahwa masalah teoritik dalam kurikulum mencakup tiga dimensi utama: pertama, dimensi filosofis yang berkaitan dengan orientasi nilai dan tujuan pendidikan; kedua, dimensi epistemologis yaitu landasan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kurikulum; dan ketiga, dimensi aksiologis, yakni nilai-nilai moral dan sosial yang hendak diwujudkan melalui pendidikan. Tanpa kesatuan pandangan pada ketiga dimensi tersebut, kurikulum akan kehilangan arah dan tidak memiliki daya transformasi terhadap peserta didik dan masyarakat (Abdurahmansyah, 2022).

Dalam konteks pendidikan nasional, banyak rancangan kurikulum yang mengadopsi teori Barat tanpa proses kontekstualisasi. Hal ini menyebabkan disorientasi epistemologis, di mana nilai-nilai lokal dan religius kurang terakomodasi. Kurikulum nasional masih berorientasi pada kompetensi teknis dan akademik, bukan pada pembentukan karakter dan spiritualitas yang integral. Akibatnya, lulusan pendidikan cenderung cenderung kognitif tetapi miskin empati dan nilai kemanusiaan (Syarifudin, 2020).

Selain itu, problem teoritik juga muncul akibat kurangnya sinkronisasi antara kebijakan kurikulum dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan kurikulum yang terlalu

cepat tanpa kajian akademik mendalam mengakibatkan guru kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa teori pengembangan kurikulum belum berpijak pada riset empiris yang kuat (Syahputra, 2021).

Dari perspektif pendidikan Islam, Abdurahmansyah (2022) menegaskan bahwa problem teoretik juga bersumber dari dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang masih terjadi hingga kini. Kurikulum di banyak lembaga Islam masih memisahkan antara pengetahuan rasional dan spiritual. Padahal, Islam memandang ilmu secara integral. Pendidikan yang berbasis tauhid seharusnya mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam satu kesatuan nilai. Tanpa integrasi ini, pendidikan akan kehilangan orientasi etik dan spiritualnya (Abdurahmansyah, 2022).

Kritik serupa dikemukakan oleh Hidayat dan Fathurrochman (2021), yang menekankan pentingnya pendekatan humanistik dan kontekstual dalam merancang kurikulum. Mereka berpendapat bahwa problem teoretik dapat diatasi dengan mengadopsi paradigma konstruktivistik, di mana peserta didik menjadi subjek aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar yang bermakna (Hidayat & Fathurrochman, 2021).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem teoretik pengembangan kurikulum di Indonesia muncul karena: krisis filosofis, yaitu lemahnya fondasi nilai dalam perumusan kurikulum; krisis epistemologis, yakni ketidaksesuaian antara teori dan konteks sosial; serta krisis aksiologis, di mana orientasi moral dan karakter belum menjadi dasar utama pembentukan kurikulum. Penyelesaian masalah ini memerlukan rekonstruksi paradigma pengembangan kurikulum yang berakar pada nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa, serta berbasis pada riset empiris agar relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

Problem Implementatif dalam Proses Pembelajaran

Masalah implementatif dalam proses pembelajaran merupakan kelanjutan logis dari persoalan teoretik dalam pengembangan kurikulum. Meskipun banyak kebijakan pendidikan telah disusun secara konseptual dengan baik, realisasi di lapangan sering menghadapi berbagai kendala praktis yang kompleks. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, lemahnya manajemen pendidikan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar-mengajar. Implementasi kurikulum sering kali tidak berjalan sesuai rancangan karena guru tidak dibekali pemahaman filosofis dan metodologis yang memadai tentang isi kurikulum itu sendiri. Akibatnya, pembelajaran menjadi bersifat mekanis dan tidak mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Abdurahmansyah, 2021).

Permasalahan implementasi kurikulum juga disebabkan oleh rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional guru. Sebagian besar guru masih menerapkan pendekatan pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru (teacher-centered), sementara kebijakan kurikulum nasional menghendaki pembelajaran aktif, kreatif, dan kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori kurikulum dan keterampilan implementatif para pendidik di lapangan (Hidayat & Fathurrochman, 2021).

Selain faktor kompetensi, aspek sarana dan infrastruktur pendidikan juga menjadi hambatan serius. Pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar banyak terhambat oleh keterbatasan fasilitas digital, terutama di daerah rural dan sekolah keagamaan. Padahal, kurikulum modern menuntut integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk mendorong kreativitas, literasi digital, dan kolaborasi daring. Ketimpangan fasilitas ini mengakibatkan kualitas pembelajaran tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan (Syahputra, 2021).

Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan implementatif juga muncul dalam hal internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual di ruang kelas. Banyak pendidik yang belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara kontekstual dalam proses belajar. Mereka cenderung

menggunakan pendekatan dogmatis, bukan reflektif. Akibatnya, pendidikan agama kehilangan daya transformasinya dan hanya menjadi hafalan konseptual. Padahal, pendidikan Islam seharusnya mengarahkan peserta didik pada proses pembentukan karakter dan kesadaran moral yang hidup dalam tindakan sehari-hari (Abdurahmansyah, 2022).

Selain itu, faktor kebijakan top-down yang masih mendominasi sistem pendidikan juga turut memperparah masalah implementatif. Pendekatan birokratis dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum menyebabkan guru tidak memiliki otonomi untuk berinovasi di kelas. Guru sering kali hanya menjalankan instruksi administratif tanpa ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan kontekstual siswa. Kondisi ini menimbulkan stagnasi pedagogis dan rendahnya kreativitas pendidikan (Ramdani, 2022).

Di sisi lain, masalah implementatif juga dapat dilihat dari kurangnya evaluasi formatif dan reflektif dalam praktik pembelajaran. Evaluasi sering dipahami semata-mata sebagai pengukuran hasil belajar (*assessment of learning*), bukan sebagai bagian dari proses pembelajaran (*assessment for learning*). Idealnya, evaluasi harus menjadi bagian integral dari implementasi kurikulum agar guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Ketidakterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan (Abdurahmansyah, 2021).

Tantangan implementatif semakin kompleks di era digital. Transformasi teknologi di dunia pendidikan menuntut adaptasi yang cepat terhadap metode dan media pembelajaran baru. Namun, kesiapan guru dan lembaga pendidikan Islam dalam memanfaatkan teknologi masih rendah, karena kurangnya pelatihan digital literacy dan minimnya integrasi nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran berbasis teknologi. Akibatnya, digitalisasi pendidikan sering kali hanya bersifat simbolik tanpa substansi pedagogis yang kuat (Dewi & Harahap, 2022).

Dengan demikian, problem implementatif dalam proses pembelajaran mencakup dimensi kompetensi guru, kebijakan pendidikan, infrastruktur, dan paradigma pedagogis. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan reformasi administratif, melainkan membutuhkan perubahan paradigma pendidikan yang menempatkan guru sebagai agen pembelajaran, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Implementasi kurikulum yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan nasional, profesionalisme guru, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan budaya belajar yang bermakna (Abdurahmansyah, 2022).

Upaya Rekonstruksi dan Solusi Pengembangan Kurikulum

Upaya rekonstruksi dan solusi dalam pengembangan kurikulum merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan teoretik dan implementatif yang selama ini menghambat efektivitas pendidikan nasional. Rekonstruksi kurikulum tidak hanya berarti memperbarui dokumen formal, tetapi juga merevitalisasi paradigma pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dan nilai-nilai luhur bangsa. Amin dan Suhono (2022) menyatakan bahwa rekonstruksi kurikulum harus diarahkan pada penguatan relevansi pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri, tanpa mengabaikan aspek humanistik dan karakter bangsa. Kurikulum baru harus menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar menghasilkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan beretika.

Pendekatan yang banyak digunakan dalam proses rekonstruksi kurikulum saat ini adalah pengembangan berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*) dan pembelajaran kontekstual (*contextual learning*). Lestari dan Wijayanti (2023) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menuntut pergeseran fokus dari sekadar penguasaan materi ke arah kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Rekonstruksi ini juga menuntut peran aktif guru sebagai *curriculum developer*, bukan sekadar

pelaksana kurikulum, sehingga guru memiliki kewenangan adaptif untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan karakter peserta didik.

Selain berbasis kompetensi, rekonstruksi kurikulum juga harus mempertimbangkan pendekatan integratif dan transdisipliner. Nugroho dan Puspitasari (2021) menegaskan bahwa kurikulum modern tidak dapat berdiri sendiri dalam satu disiplin ilmu, melainkan harus mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dan nilai moral untuk menghasilkan manusia utuh. Pendekatan transdisipliner memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan antara pengetahuan ilmiah, etika, dan spiritualitas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga emosional dan sosial, sehingga terbentuk karakter yang kuat dan tangguh dalam menghadapi perubahan global.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam upaya rekonstruksi kurikulum adalah penguatan literasi digital dan pedagogi inovatif. Putra dan Maulana (2023) mengemukakan bahwa pendidikan masa kini harus diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir berbasis teknologi dan literasi digital. Kurikulum yang responsif terhadap era digital akan membantu peserta didik mengembangkan kecakapan teknologi yang beretika, cerdas, dan produktif. Namun, penguatan digitalisasi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan agar peserta didik tidak terjebak pada dehumanisasi teknologi.

Dari sisi manajemen pendidikan, reformasi kebijakan kurikulum juga menjadi solusi penting. Rahayu (2020) menyatakan perlunya desentralisasi kurikulum agar sekolah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan karakteristik daerah masing-masing. Model kebijakan yang adaptif ini memungkinkan inovasi pendidikan berkembang di tingkat lokal tanpa kehilangan arah nasional. Keberhasilan rekonstruksi kurikulum sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai ekosistem pendidikan yang saling mendukung.

Selain itu, upaya rekonstruksi kurikulum juga perlu memperkuat evaluasi berbasis refleksi dan umpan balik. Wulandari dan Nasir (2022) mengemukakan bahwa sistem evaluasi harus bergeser dari paradigma pengukuran hasil belajar menjadi proses reflektif yang melibatkan siswa dan guru secara aktif. Evaluasi seperti ini mendorong kesadaran pedagogik bahwa belajar bukan hanya tentang capaian kognitif, tetapi juga proses pertumbuhan nilai dan kompetensi hidup. Evaluasi yang partisipatif membantu kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik dan perkembangan sosial masyarakat.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi kurikulum merupakan proses multidimensional yang melibatkan pembaruan paradigma, desain, dan praktik pendidikan. Solusi pengembangan kurikulum yang berkelanjutan harus berlandaskan pada tiga prinsip utama: relevansi terhadap kebutuhan zaman dan karakter bangsa; fleksibilitas dalam pelaksanaan di berbagai konteks pendidikan; serta integrasi nilai dan teknologi untuk membangun peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global. Hanya dengan sinergi antara teori, kebijakan, dan praktik pendidikan, kurikulum dapat berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang sejati dan berkelanjutan.

Implikasi Pengembangan Kurikulum terhadap Mutu Pembelajaran

Pengembangan kurikulum yang efektif memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Mutu pembelajaran tidak hanya diukur dari hasil akademik peserta didik, tetapi juga dari kualitas proses belajar yang terjadi, keterlibatan aktif siswa, serta relevansi antara pembelajaran dan kebutuhan kehidupan nyata. Menurut Kurniawan dan Harjito (2021), pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan peserta didik (*learner-centered curriculum*) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar, partisipasi aktif, dan kemampuan berpikir kritis siswa.

Kurikulum yang fleksibel memungkinkan siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial yang bermakna.

Implikasi pertama yang menonjol dari rekonstruksi kurikulum adalah peningkatan kualitas pedagogik guru. Guru tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana instruksi semata, tetapi sebagai learning facilitator dan curriculum designer. Berdasarkan penelitian Rahmadani dan Suryadi (2022), reformasi kurikulum menuntut guru untuk memiliki keterampilan reflektif, adaptif, dan kolaboratif agar dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan perkembangan sosial dan teknologi. Ketika guru terlibat aktif dalam perancangan kurikulum, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan kreatif, sehingga mutu pendidikan meningkat secara sistemik.

Selain itu, kurikulum yang dikembangkan secara integratif juga meningkatkan relevansi pendidikan terhadap dunia kerja dan kehidupan sosial. Halim dan Yusuf (2023) menyatakan bahwa implementasi kurikulum berbasis kompetensi dan karakter telah meningkatkan kesiapan kerja lulusan serta memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan industri. Kurikulum yang mengintegrasikan aspek teknis dan etis membantu peserta didik memahami bahwa kompetensi profesional harus disertai tanggung jawab moral dan sosial.

Dari perspektif pendidikan Islam, pengembangan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral memiliki implikasi terhadap pembentukan karakter dan keseimbangan kepribadian peserta didik. Latifah dan Nasution (2021) mengemukakan bahwa penerapan kurikulum berbasis nilai Islam mampu menumbuhkan kesadaran etis, empati sosial, serta kemampuan berpikir reflektif pada siswa. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum yang dirancang dengan integrasi nilai spiritual tidak hanya meningkatkan kecerdasan kognitif, tetapi juga memperkuat dimensi afektif dan spiritual peserta didik.

Kurikulum juga memiliki implikasi besar terhadap penerapan teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi digital dalam kurikulum dapat meningkatkan efisiensi proses belajar dan memperluas akses terhadap sumber pengetahuan global. Putri dan Rachman (2023) menegaskan bahwa melalui pembelajaran berbasis teknologi, peserta didik memiliki kesempatan untuk berkolaborasi lintas wilayah dan mengembangkan literasi digital yang esensial di era abad ke-21. Namun, keberhasilan integrasi teknologi sangat tergantung pada kemampuan guru dalam memanfaatkan media digital secara pedagogis dan etis.

Selain penguatan pedagogi dan teknologi, implikasi penting lainnya adalah munculnya budaya belajar reflektif dan berkelanjutan. Widyastuti dan Firmansyah (2022) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum yang menekankan evaluasi formatif mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses penilaian diri. Model ini membangun kesadaran belajar sepanjang hayat (lifelong learning awareness), yang pada gilirannya memperkuat daya saing pendidikan nasional di tingkat global.

Secara keseluruhan, pengembangan kurikulum yang baik tidak hanya memperbaiki struktur dan konten pembelajaran, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan transformatif. Ketika teori kurikulum diimbangi dengan implementasi yang berbasis riset, pembelajaran menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dengan demikian, mutu pembelajaran dapat meningkat secara berkelanjutan karena seluruh komponen pendidikan guru, siswa, institusi, dan kebijakan bergerak dalam arah yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkarakter.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan pengembangan kurikulum di Indonesia terutama terletak pada ketidaksesuaian antara landasan teoretik dan implementatif. Secara teoritik, kurikulum masih mengalami krisis filosofis, epistemologis, dan aksiologis yang

menyebabkan lemahnya integrasi nilai-nilai budaya dan spiritual dengan aspek akademik. Secara implementatif, rendahnya kompetensi guru, keterbatasan fasilitas, dan kebijakan top-down menyebabkan pembelajaran tidak berjalan optimal dan kurang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik serta perkembangan teknologi. Kajian ini juga menyoroti perlunya rekonstruksi kurikulum yang holistik dengan menekankan relevansi, fleksibilitas, dan integrasi nilai serta teknologi untuk mendukung pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21. Temuan ini memperkuat pentingnya sinergi antara kebijakan, praktik pendidik, dan konteks sosial budaya lokal dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi pustaka yang tidak melibatkan data lapangan langsung sehingga pemahaman terhadap dinamika implementasi kurikulum di berbagai daerah bisa kurang mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif lapangan dengan wawancara atau observasi untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai praktik pembelajaran di konteks nyata. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan profesionalisme guru melalui pelatihan pedagogik dan literasi digital, desentralisasi kebijakan kurikulum, serta evaluasi pembelajaran yang reflektif. Pendidikan nasional akan lebih mampu menjawab tantangan global dan mempertahankan nilai-nilai spiritual dan sosial bangsa jika proses pengembangan kurikulum berlangsung secara terintegrasi dan adaptif sesuai kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmansyah. (2021). Kajian teoritik dan implementatif pengembangan kurikulum. Rajawali Pers.
- Abdurahmansyah. (2022). Cakrawala pendidikan Islam: Isu-isu kurikulum dan pembelajaran klasik sampai kontemporer. Nas Media Pustaka.
- Abdurrahmansyah. (2021). Perbandingan pendidikan Islam: Isu-isu kontemporer tentang konsep, kebijakan, dan implementasi. CV. Anugrah Jaya.
- Alwasilah, A. C. (2019). Filsafat pendidikan Islam: Paradigma humanisasi dan transformasi. Remaja Rosdakarya.
- Amin, N., & Suhono, S. (2022). Rekonstruksi kurikulum pendidikan nasional berbasis kompetensi dan nilai kebangsaan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 12(2), 115–130.
- Cresswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R., & Harahap, R. (2022). Integrasi teknologi digital dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Islam*, 12(1), 45–60.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Hidayat, A., & Fathurrochman, I. (2021). Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di era modern. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 88–102.

- Kurniawan, A., & Harjito, B. (2021). Peningkatan mutu pembelajaran melalui kurikulum berbasis peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Modern*, 9(2), 145–160.
- Latifah, S., & Nasution, A. (2021). Integrasi nilai Islam dalam kurikulum untuk pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), 112–128.
- Lestari, D., & Wijayanti, T. (2023). Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran inovatif. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 3(1), 22–35.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (8th ed.). Pearson Education.
- Putra, A., & Maulana, R. (2023). Kurikulum era digital: Penguatan literasi dan etika teknologi dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(2), 88–104.
- Putri, D., & Rachman, R. (2023). Integrasi teknologi digital dalam kurikulum untuk peningkatan mutu pembelajaran abad 21. *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 7(1), 33–47.
- Ramdani, M. (2022). Kendala implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 101–113.
- Rahayu, S. (2020). Desentralisasi kebijakan kurikulum sebagai upaya inovasi pendidikan daerah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 1–14.
- Syarifudin, A. (2020). Kebijakan pengembangan kurikulum dalam perspektif pendidikan nasional. *Jurnal Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 75–86.
- Syahputra, H. (2021). Analisis implementasi kurikulum 2013 dan tantangan pengembangan kurikulum di era digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(1), 12–25.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.
- Sudaryono. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Paradigma, desain, dan aplikasi dalam pendidikan*. Kencana Prenada Media.
- Wulandari, A., & Nasir, M. (2022). Evaluasi kurikulum berbasis refleksi dalam pembelajaran abad 21. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 133–147.